BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah suatu usaha manusia untuk membina kepribadian sesuai dengan nilai-nilai di masyarakat dan budaya. Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah, sehingga pendidikan mempunyai misi seluruh aspek dengan dinamika hidup manusia serta perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidupnya, hal ini menunjukan bahwa masalah pendidikan adalah dinamis, dengan kata lain pendidikan mempunyai nilai-nilai eksistensi selalu mengikuti perubahan jaman.

Pendidikan juga merupakan upaya yang dapat mempercepat pengembangan sumber daya manusia, untuk mampu mengembangkan tugas yang dibebankan kepadanya. Pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab pendidikan merupakan suatu proses pembentukan manusia, untuk menumbuh kembangkan potensi yang ada.[1]

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam masyarakat. Masyarakat yang memiliki pendidikan yang baik maka kehidupan masyarakatnya akan baik pula. Perkembangan lingkungan haruslah diimbangi dengan perkembangan pendidikan masyarakatnya juga, sehingga tercapainya kehidupan masyarakat yang tidak terbelakang.

[1] Wahjosumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 80-81.

Sesuai dengan itu di dalam Al Quran telah dijelaskan tentang pentingnya tanggung jawab intelektual dalam melakukan berbagai kegiatan pendidikan. Dalam kaitan ini Al Quran menganjurkan manusia untuk belajar dalam arti seluas-luasnnya dan sedalm-dalamnya hingga akhir hayat, Al Quran mengharuskan seseorang agar bekerja dengan dukungan ilmu pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang dimiliki.[2]

Menuntut ilmu merupakan amanah dari Allah Swt. yang harus dilaksanakan oleh manusia, hal ini dinyatakan dalam firman-Nya pada Q.S. at-Taubah/ 9: 122.[3]

۞ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَاۤفَّةً ۗفَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَاۤىِٕفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ﴿١٢٢﴾

Ayat ini menuntun kaum muslim untuk membagi tugas dengan menjelaskan bahwa tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin yang selama ini dianjurkan agar bergegas menuju medan perang pergi semua ke medan perang sehingga tidak tersisa lagi yang melaksanakan tugas-tugas yang lain. Jika memang tidak ada panggilan yang bersifat mobilisasi umum maka mengapa tidak pergi tiap-tiap golongan yakni kelompok besar diantara mereka beberapa golongan yakni kelompok besar diantara mereka beberapa orang dari golongan itu untuk bersungguh-sungguh memperdalam pengetahuan tentang agama sehingga dapat memperoleh manfaat untuk diri mereka dan untuk orang lain.[4] Sesuai dengan penjelasan tafsiran tersebut maka kaum muslim wajib untuk memperdalam ilmu pengetahuan agamanya agar mereka dapat

[2] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al Quran,* (Bandung: Mizan, 2007), hal. 14.

[3] Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Quran KEMENAG In Microsoft Word*, (Indonesia: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hal. th.

[4] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah,* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 749-751.

mengajari dan mengetahui ilmu-ilmu agama supaya takut kepada Allah Swt. serta menjauhi dari larangan Allah Swt., maka dari itu setiap muslim wajib memperdalam ilmu pendidikan agama Islam.

Dalam asbabunnuzul QS. at-Taubah ayat 122 ini dijelasan oleh Wahbah Zuhaili menurutnya ayat ini turun ketika hampir seluruh kaum Mukmin begitu antusias ikut serta dalam pasukan yang dikirim oleh Nabi. Mereka meninggalkan Nabi di Madinah bersama segelintir orang, maka turunlah ayat ini menjelaskan kepada umat muslim untuk membagi tugas antara berperang dan memperdalam ilmu pengetahuan agama.[5]

Dalam surat at-Taubah ayat 122 dijelaskan bahwa tidak patut bagi kaum mukminin semuanya keluar memerangi musuh mereka, sebagaimana yang tidak dibenarkan bagi mereka untuk tinggal semua. Mengapa tidak keluar untuk berperang dan berjihad dari setiap golongan sejumlah orang yang memadai dan mewujudkan mashlahat, tujuannya agar orang-orang yang tinggal bisa mendalami agama Allah Swt. dan mengetahui apa yang terbaru dari hukum-hukum agama Allah Swt. dan wahyu yang diturunkan pada rasul-Nya, agar mereka nanti memperingatkan kaum mereka dengan ilmu yang mereka pelajari tatkala mereka kembali kepada kaumnya itu. Mudah-mudahan mereka takut kepada siksaan Allah Swt. dengan menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya.

[5] Wahbah Zuhaili, *Al-Mausu'a al-Qur'aniyyah al-Muyassarah*, (PT. Niaga Swadaya: Jakarta, 2009), hal. 112.

Kemudian dikuatkan dengan hadis perintah menuntut ilmu yang berbunyi:

عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِّي قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ[6]

Dari ayat Al-Qur'an dan hadis tersebut perintah menuntut ilmu dalam kehidupan manusia tidak diragukan lagi, yaitu agar manusia dapat menjalankan kehidupan dunia dan akhirat sebaik mungkin.

Upaya peningkatan kualitas pendidikan dari tahun ke tahun, selalu menjadi program pemerintah, salah satunya dengan ditetapkannya UU No. 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.[7]

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi hak pendidikan bagi tiap warganya. Melalui sekolah yang terjangkau dari sisi pembiayaan, bermutu dari segi layanan dan berkualitas dari sisi pembelajaran. Selain pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung pemerintah, sarana dan prasarana, kurikulum, sumber belajar dan daya dukung lainnya perlu diupayakan pemerintah. Beberapa indikator yang digunakan untuk ukuran keberhasilan pembangunan pendidikan antara lain, rata-

[6] Bukhari Umar, *Hadits Tarbawi* (Amzah: Jakarta, 2012), hal. 07.

[7] Wahjosumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 82.

rata lama sekolah, tingkat pendidikan, angka partisispasi murni (APM) dan angka partisipasi sekolah (APS).

Secara umum, tingkat pendidikan penduduk dapat dilihat dari rata-rata lama bersekolah. Indikator ini dapat menunjukkan sampai pada jenjang pendidikan apa penduduk di suatu wilayah dapat menikmati pendidikan. Pada tahun 2023, rata-rata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk Banjar yang berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal adalah 7,94 tahun. Angka ini mengalami peningkatan bila dibanding tahun 2021 yang menunjukan angka sebesar 7,71 tahun. Hal ini masih menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan penduduk 25 tahun ke atas baru dapat menjalani pendidikannya sampai sekitar kelas 1 SMP saja atau putus sekolah ketika akan naik kelas 2 SMP.

Sementara itu kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan semakin mengecil dari sisi partisipasi sekolah dan kepemilikan ijazah tertinggi. Proporsi penduduk perempuan yang tidak memiliki ijazah SD sebesar 19,23% lebih tinggi dibandingkan laki-laki sebesar 14,43%. Hal ini karena adanya pandangan bahwa laki-laki lebih diprioritaskan untuk bekerja membantu penghasilan keluarga kedepannya. Tidak punya ijazah SD adalah penduduk berumur lima belas tahun ke atas yang tidak pernah atau belum pernah terdaftar dan tidak pernah/belum pernah aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun nonformal (Paket A/B/C), termasuk juga yang mereka sudah bersekolah pada tingkat SD namun tidak melanjutkan sampai tamat.

Begitu pula untuk penduduk yang memiliki ijazah pada tingkatan SD, SMP, dan SMA secara rata-rata persentase penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan

perempuan. Jika dilihat secara total penduduk yang memiliki ijazah SD adalah yang tertinggi di Kabupaten Banjar yaitu sebesar 29,83%, hal ini sejalan dengan kondisi rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banjar yang hanya sampai kelas 1 SMP kemudian tidak dapat melanjutkan sekolah lagi.

Pembangunan di bidang pendidikan bertujuan meningkatkan akses penduduk pada fasilitas pendidikan, sehingga diharapkan makin banyak penduduk yang dapat bersekolah. Pembangunan pendidikan di Banjar telah menunjukkan keberhasilan yang cukup besar. Wajib belajar 6 tahun yang didukung diteruskan dengan wajib belajar 9 tahun adalah program sektor pendidikan yang diakui cukup sukses dimana standar program wajib belajar dikatakan berhasil jika nilai angka partisipasi sekolah (APS) SD lebih dari 98% dan APS SMP lebih dari 70%. Pada tahun 2021, total APS usia 7-12 tahun (SD) mencapai 99,18% dan usia 13-15 tahun (SMP) nilainya lebih kecil dibanding SD yaitu 85,64%, nilai APS ini semakin menurun pada APS SMA (usia 16-18 tahun) yaitu 57,15%. Dengan kata lain, semakin tinggi kelompok umur tersebut semakin kecil persentase mereka yang bersekolah. Hal ini perlu ditinjau lebih jauh mengapa mereka tidak bersekolah lagi terutama untuk kelompok umur 7-15 tahun dalam rangka menyukseskan program wajib belajar 9 tahun. Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan partisipasi sekolah semakin menurun diantaranya kesulitan ekonomi, kesulitan akses menuju sekolah, ketiadaan sarana dan prasarana sekolah terdekat dan lain-lain. Untuk mengatasi hal ini perlu perhatian khusus dari pemerintah dalam menjamin ketersediaan akses dan sarana sekolah untuk masyarakat.

Selain APS, terdapat dua ukuran partisipasi sekolah yang juga sering digunakan untuk melihat kinerja dunia pendidikan, yaitu angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM). Keduanya mengukur penyerapan penduduk usia sekolah oleh sektor pendidikan. Perbedaan di antara keduanya adalah penggunaan kelompok usia "standar" di setiap jenjang pendidikan. Usia standar yang dimaksud adalah rentang usia yang dianjurkan pemerintah untuk jenjang pendidikan, APK digunakan untuk mengukur proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat batasan umur terhadap jumlah anak dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK pada tingkat SD secara total di Kabupaten Banjar pada tahun 2022 mencapai 110,35% mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 artinya terdapat 110,35% dari seluruh penduduk yang bersekolah berada pada tingkat sekolah dasar. Ini berarti bahwa jumlah murid sekolah pada jenjang sekolah dasar lebih besar dari pada jumlah penduduk usia 7-12 tahun atau ada sekitar 10,35% penduduk di luar usia SD yang seharusnya 7-12 tahun yang bersekolah di SD. APK penduduk Banjar cenderung semakin menurun pada tingkat pendidikan yang semakin tinggi. Pada jenjang SMP, APK menjadi 81,25% bahkan pada jenjang SMA APK hanya mencapai 76,46%. Seperti halnya APK, angka partisipasi murni (APM) juga cenderung menurun untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi. APM menunjukkan proporsi anak sekolah pada kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. [8]

[8] Badan Pusat Statistik, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar 2023 Volume 7, 2023,* (Kabupaten Banjar: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar, 2023), hal. 28-33.

Berdasarkan hal diatas yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin menurun juga APS, APK dan APMnya. Hal ini juga berlaku pada masyarakat untuk tingkat perguruan tinggi, dimana partisipasi masyarakat Kabupaten Banjar cendrung masih rendah yang melanjutkan sampai ke perguruan tinggi, terkhusus untuk daerah pedesaan yang terpencil.

Perguruan tinggi merupakan pendidikan yang ditempuh setelah seseorang menempuh pendidikan menengeh atas, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 19 Ayat 1, perguruan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.[9] Perguruan tinggi yang ada di Indonesia dapat berbentuk Politeknik, Sekolah Tinggi, Akademik, Universitas dan Institut.

Perguruan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia yang terdidik, yaitu menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian dan dapat menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang didapat kepada masyarakat serta dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.[10]

Pada setiap jenis perguruan tinggi tersebut biasanya memiliki sejumlah jurusan atau program studi yang ditawarkan. Setiap calon mahasiswa yang akan

---

[9] Hafaz Hanafia, "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa/I Memilih Jurusan Ilmu Administrasi Perpajakan Pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2016), hal. 14.

[10] Sudiyono, *Manajemen Pendidikan Tinggi,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hal. 22-23.

memasuki suatu perguruan tinggi, akan dihadapkan kepada pemilihan program studi atau jurusan yang akan dimasukinya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang tujuan perguruan tinggi adalah menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan kesenian serta menyumbangkan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.[11]

Untuk itu, perguruan tinggi merupakan tempat dan wadah bagi para pelajar yang ingin melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Di Indonesia, pelajar merupakan tolak ukur kemajuan pendidikan sehingga kita harus mampu menghasilkan siswa yang berdaya saing di segala bidang akademik.

Perguruan tinggi bukanlah sekedar lembaga pendidikan saja, melainkan juga sebagai lembaga yang menjembatani antara mahasiswa dengan masyarakat sekitar, agar ilmu yang didapatkan di perguruan tinggi bisa bermanfaat tak hanya bagi mereka sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain.

Lembaga pendidikan sebagai lembaga sosial yang tumbuh dan berkembang dari dan untuk masyarakat tidak terlepas dari target dan sasaran yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri, sehingga lembaga pendidikan yang memenuhi target dan sasaran tersebut akan selalu dicari dan diburu oleh masyarakat untuk dijadikan tempat belajar anaknya, adapun keberhasilan pendidikan dalam suatu lembaga

[11] Depdiknas, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Biro Hukum dan Organisasi Sekjen Depdinas, 1991.), hal. 49.

ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah peserta didik, kepala sekolah, guru, masyarakat dan lain-lain. Dari beberapa faktor tersebut masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung yang mempunyai andil yang sangat besar, pandangan masyarakat tentang pendidikan itu berpengaruh terhadap berlangsungnya suatu proses pendidikan, sedangkan pandangan masyarakat itu tidak terlepas dari kultur budaya, sosial keagamaan, sosial ekonomi dan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.

Pandangan masyarakat atau disebut juga dengan persepsi adalah proses berlangsungnya saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk kedalam otak. Didalamnya terjadi proses berpikir yang pada akhirnya terwujud dalam sebuah pemahaman.[12]

Persepsi adalah proses pemaknaan terhadap stimulus. Jika stimulusnya berupa benda disebut objek *perception* dan jika stimulusnya berupa manusia disebut sosial *perception*. Menurut Baron dan Byrne, persepsi sosial adalah suatu usaha untuk memahami orang lain dan diri kita sendiri,[13] sedangkan persepsi menurut Bimo Walgito adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan peran.[14]

Kehidupan masyarakat tidak luput dari kontroversi tentang pendapat atau persepsi yang menjadi dasar kehidupan yang dimiliki masyarakat ketika mengenal

---

[12] Sarlito W. Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal. 86.

[13] Robert A. Baron dan Donn Byrne, *Social Psychology: Understanding Human Interaction*, edisi ke-10 (Boston: Allyn and Bacon, 2000), hal. 78.

[14] Bimo Walgito, *Psikologi Sosial: Suatu Penganta*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hal. 99.

lingkungannya, tentang pendidikan, seperti berbagai masalah yang berkaitan dengan proses pendidikan, tentang ketidaktertarikan pada anak yang melanjutkan studinya, lebih menekankan pekerjaan dari pada pendidikan lanjutan, karena gelar hanyalah prasyarat untuk melamar pekerjaan, bukan hasil dari proses pelatihan yang sebenarnya. Sangat ironis, namun ini adalah bukti betapa sedikitnya nilai pendidikan di mata masyarakat. [15]

Tidak semua orang tua mempunyai semangat atau keinginan dalam mendidik anak-anaknya supaya menjadi manusia yang berpenetahuan luas dan berketerampilan banyak, karena keadaan ekonomi atau kesadaran orang tua rendah dalam mendidik anak. Khususnya masyarakat desa, dimana desa merupakan tempat tinggal penduduk yang mata pencahariannya pada umumnya bertumpu pada bidang pertanian,[16] namun tidak semua masyarakat di pedesaan mengalami kemiskinan, karena masyarakat desa terbagi dalam beberapa lapisan yaitu: lapisan atas pada masyarakat pedesaan dipuduki oleh warga desa kaya yang terdiri dari orang-orang pemilik perusahaan perkayuan yang besar yang bermukim di desa, pemilik lahan usaha tani yang besar, dokter, dan para profesional yang lulus perguruan tinggi, lapisan menengah di pedesaan misalnya guru sekolah, pemilik lahan usaha tani dalam ukuran menengah dan orang-orang berpenghasilan lumayan atau buruh termasuk kedalam kelas menengah, sedangkan lapisan paling bawah adalah orang-

[15] Tursila dkk, "Persepsi Masyarakat terhadap Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di Dusun Ngagrong Kelurahan Wonolelo Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang," *Journal on Education* Volume 05, No. 04, (Agustus 2023): hal. 13420.

[16] Peter hagul, *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1992), hal. 01.

orang yang bekerja sebagai buruh perusahaan desa, pelayan toko, para buruh tenaga kasar dan mereka yang berpenghasilan rendah.[17]

Tingkat pendidikan masyarakat pedesaan umumnya masih rendah dimana mayoritas pendidikannya sampai tingkat SD sehingga pengetahuan pendidikan yang mereka ketahui juga terbatas, karena tingkat kesadaran masyarakat di komunitas pedesaan terhadap pendidikan formal masih rendah, hal ini tentunya dipengaruhi banyak faktor mengapa tingkat pendidikan formal di pedesaan masih rendah, diantaranya yaitu akses dan persepsi masyarakat.

Adapun gejala-gejala permasalahan dari hasil observasi dan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang berkaitan dengan pendidikan masyarakat pedesaan di Kabupaten Banjar, antara lain: 1. akses pendidikan tinggi yang sulit dijangkau oleh masyarakat pedesaan, 2. beberapa dari masyarakat masih menganggap bahwa pendidikan itu tidak terlalu penting, padahal pendidikan memberikan kontribusi dalam perkembangan masyarakat, tetapi mungkin masih banyak masyarakat yang belum merasakan kontribusi pendidikan itu sendiri, 3. dikarenakan biaya pendidikan yang semakin mahal, yang tidak terjangkau oleh sebagian kalangan masyarakat golongan bawah, dengan demikian maka timbul persepsi masyarakat yang menganggap bahwa pendidikan tidak terlalu penting, 4. minimnya minat terhadap pendidikan perguruan tinggi, walaupun secara ekonomi sebagian masyarakat mampu, 5. kurangnya responsibilitas terhadap jenjang pendidikan perguruan tinggi, mereka lebih memilih menikah, berdagang dan menjadi buruh pabrik dari pada melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi.

[17] Bahrein T. Sugihen, *Sosiologi Pedesaan*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1996), hal. 150.

Melihat pentingnya permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini, maka penulis tertarik untuk lebih mendalami dan mengetahui secara detail permasalahan tersebut dengan mengangkat judul "**Akses dan Persepsi Masyarakat Pedesaan Terhadap Perguruan Tinggi Di Kabupaten Banjar".**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah mengenai "Akses dan Persepsi Masyarakat Pedesaan terhadap Perguruan Tinggi di Kabupaten Banjar". Untuk memudahkan dalam mengurai dan mendeskripsikan permasalahan yang akan dilakukan dalam penelitian, maka diperlukan fokus pembahasan atau fokus penelitian berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan. Dari fokus penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Akses masyarakat terhadap perguruan tinggi di Kabupaten Banjar.
    a. Bagaimana akses masyarakat pedesaan dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Kabupaten Banjar?
    b. Apa saja faktor penyebab terbatasnya akses masyarakat pedesaan dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Kabupaten Banjar?
    c. Bagaimana peran pemerintah terhadap akses masyarakat pedesaan dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Kabupaten Banjar?
2. Persepsi masyarakat terhadap perguruan tinggi di Kabupaten Banjar.
    a. Bagaimana persepsi masyarakat pedesaan terhadap perguruan tinggi di Kabupaten Banjar?
    b. Bagaimana minat masyarakat pedesaan terhadap perguruan tinggi di Kabupaten Banjar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini tidak lepas dari pokok permasalahan di atas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan akses masyarakat terhadap perguruan tinggi di Kabupaten Banjar yang meliputi akses, faktor-faktor dan peran pemerintah terhadap akses masyarakat pedesaan dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Kabupaten Banjar.
2. Mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap perguruan tinggi di Kabupaten Banjar yang meliputi persepsi masyarakat pedesaan terhadap perguruan tinggi dan minat masyarakat pedesaan terhadap perguruan tinggi di Kabupaten Banjar.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang jelas bagi pembaca. Terdapat 2 manfaat yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Segi Teoritis

Memperkaya khazanah pengetahuan tentang perguruan tinggi khususnya mengenai akses dan persepsi masyarakat pedesaan terhadap perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Banjar.

2. Segi Praktis

a. Memberikan pengetahuan dan pengalaman baru bagi penulis, khususnya yang berkenaan dengan isu yang diteliti.

b. Menjadi sumber informasi bagi penulis berikutnya dalam melakukan penelitian lebih mendalam terhadap objek yang sama.
c. Menjadi referensi bagi pembaca untuk memperluas wawasan dan pemahaman tentang akses dan persepsi masyarakat terhadap perguruan tinggi.
d. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat tentang akses dan persepsi masyarakat terhadap perguruan tinggi.
e. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan akses dan minat masyarakat dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalahan memahami dan meluasnya pembahasan, sesuai dengan judul penelitian tesis yaitu akses dan persepsi masyarakat pedesaan terhadap perguruan tinggi di Kabupaten Banjar, maka definisi istilah yang perlu ditegaskan sebagai berikut:

1. Akses

Akses pendidikan adalah kemudahan yang diberikan kepada setiap warga masyarakat untuk menggunakan kesempatannya memasuki suatu program pendidikan. Akses tersebut dapat berupa sikap sosial yang nondiskriminatif, kebijakan politik dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mendukung dan mencegah diskriminasi, tersedianya fasilitas pendidikan yang *aksesibel*, tersedianya alat bantu belajar/mengajar yang sesuai, dan biaya pendidikan yang terjangkau, yang memungkinkan setiap warga masyarakat menggunakan

kesempatannya untuk mengikuti proses belajar/mengajar pada program pendidikan yang dipilihnya.[18] Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan akses adalah kemudahan atau hambatan yang dialami oleh masyarakat di wilayah pedesaan Kabupaten Banjar dalam memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Akses ini mencakup beberapa aspek yang diukur melalui wawancara dan observasi, yaitu: akses geografis yang mencakup jarak tempat tinggal masyarakat ke perguruan tinggi serta ketersediaan sarana transportasi yang memadai; akses ekonomi yang mencakup kemampuan masyarakat dalam membiayai pendidikan tinggi, termasuk uang kuliah, biaya hidup, serta biaya transportasi; akses informasi yang mencakup sejauh mana masyarakat mendapatkan informasi mengenai perguruan tinggi, seperti pendaftaran, program studi, beasiswa dan prospek lulusan; dan akses sosial dan budaya yang mencakup adanya dukungan atau hambatan dari lingkungan keluarga dan masyarakat yang mempengaruhi keputusan untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

Data mengenai akses diperoleh melalui wawancara mendalam dengan kepala desa, guru, orang tua dan masyarakat yang menempuh pendidikan sampai ke perguruan tinggi dan yang tidak menempuh sampai ke perguruan tinggi, serta observasi terhadap kondisi sosial dan geografis di masing-masing desa.

2. Persepsi

Persepsi menurut Jalaluddin Rahmad, dalam bukunya *Psikologi Komunikasi* mengartikan persepsi sebagai pengalaman tertentu obyek, peristiwa, atau

[18] "https://jendela.kemdikbud.go.id/v2/kajian/detail/aksesibilitas-memeroleh-pendidikan-untuk-anak-anak-di-indonesia, diakses pada 28 desember 2023 pukul 02.22.," t.t.

hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dalam menafsirkan pesan.[19] Dalam penelitian ini persepsi yang dimaksudkan adalah pandangan, penilaian, sikap dan keyakinan masyarakat desa di Kabupaten Banjar mengenai keberadaan, manfaat serta relevansi pendidikan tinggi bagi kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat. Persepsi ini mencerminkan bagaimana masyarakat memandang pendidikan tinggi sebagai peluang atau hambatan untuk meningkatkan taraf hidup. Aspek-aspek persepsi yang dikaji meliputi: persepsi tentang manfaat perguruan tinggi, yaitu pandangan masyarakat mengenai keuntungan atau manfaat pendidikan tinggi, seperti peningkatan, pengetahuan, peluang kerja, status sosial, serta kontribusi terhadap pembangunan desa; persepsi tentang kendala melanjutkan pendidikan tinggi, seperti faktor biaya pendidikan, jarak lokasi kampus, keterbatasan informasi atau nilai-nilai budaya yang mungkin tidak mendukung pendidikan tinggi; persepsi tentang relevansi pendidikan tinggi, apakah masyarakat menilai pendidikan tinggi sebagai sesuatu yang penting, bermanfaat secara langsung atau justru dianggap kurang memberikan dampak signifikan dalam kehidupan masyarakat desa.

Persepsi masyarakat ini diukur dan dianalisis melalui wawancara dan observasi. Wawancara mendalam dengan informan yang mencakup masyarakat yang melanjutkan pendidikan sampai ke perguruan tinggi dan yang tidak sampai ke perguruan tinggi, orang tua yang menyekolahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi dan yang tidak sampai ke perguruan tinggi, guru dan kepala desa untuk

[19] Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: CV. Remaja Rosdakarya, 1996), hal. 51.

menggali pandangan subjektif, pengalaman serta alasan di balik sikap mereka terhadap perguruan tinggi. Observasi dilakukan untuk mencermati situasi sosial di masyarakat desa, termasuk perilaku, kebiasaan serta interaksi yang mencerminkan pandangan masyarakat terhadap perguruan tinggi (misalnya, partisipasi dalam kegiatan pendidikan, dukungan terhadap anak sekolah dan lain-lain).

3. Masyarakat Pedesaan

Masyarakat menurut para ahli seperti Mac.Iver, J.L. Gillin dan J.P Gillin sepakat bahwa adanya saling bergaul dan interaksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama sehingga masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat yang bersifat kontinu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.[20]

Pedesaan merupakan suatu kawasan (wilayah desa yang dihuni oleh sekelompok orang (penduduk). Dalam penelitian ini masyarakat pedesaan yang dimaksud adalah masyarakat pedesaan yang tinggal di Kabupaten Banjar yaitu pada Kecamatan Karang Intan (Desa Balau, Desa Sungai Besar dan Desa Mandi Kapau Barat), Kecamatan Astambul (Desa Pingaran Ilir, Desa Astambul Kota dan Desa Kelampaian Tengah) dan Kecamatan Sungai Tabuk (Desa Lok Baintan Dalam, Desa Paku Alam dan Desa Sungai Tabuk Keramat.

4. Perguruan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah (SMK/SMA/MA). Program yang ada dalam pendidikan tinggi ini tidak

[20] Sulaiman, *Ilmu Sosial Dasar*, (Bandung: IKAPI, 1992), hal. 53.

hanya sarjana (S1) melainkan ada program diploma, pendidikan profesi, magister (S2), bahkan doktor (S3), sedangkan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi ini dikenal dengan nama Perguruan Tinggi (PT), baik itu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS), dalam penelitian ini perguruan tinggi yang dimaksud adalah perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Banjar yaitu Institut Agama Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Banjarbaru, Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Akademi Kebidanan Banjarbaru, Universitas Nahdatul Ulama Gambut, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Banjarbaru, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Intan Martapura, Sekolah Tinggi Agama Islam Al Falah Banjarbaru dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darussalam Martapura.

5. Kabupaten Banjar

Kabupaten Banjar adalah sebuah kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu kota Banjar terletak di Kecamatan Martapura, Kabupaten ini memiliki luas wilayah 4.688,00 km² dan berpenduduk sebanyak 580.100 jiwa pada akhir tahun 2023.[21] Kabupaten Banjar terdiri dari 20 Kecamatan, yaitu Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Gambut, Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Martapura, Kecamatan Astambul, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Aranio, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Beruntung Baru, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Peramasan, Kecamatan

[21] "https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Banjar diakses pada tanggal 06 April 2023 pukul 00.47."

Tatah Makmur, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Telaga Bauntung dan Kecamatan Cintapuri Darussalam.

Di dalam penelitian ini penulis membatasi cakupan daerah pedesaan di Kabupaten Banjar menjadi 3 Kecamatan saja yaitu: Kecamatan Karang Intan pada Desa Balau, Desa Sungai Besar dan Desa Mandi Kapau Barat; Kecamatan Astambul pada Desa Pingaran Ilir, Desa Astambul Kota dan Desa Kelampaian Tengah; dan Kecamatan Sungai Tabuk pada Desa Lok Baintan, Desa Paku Alam dan Desa Sungai Tabuk Keramat.

F. Penelitiaan Terdahulu

1. Tesis yang ditulis oleh Nikita Dian Paranti dengan judul, "Persepsi Masyarakat Tentang Pendidikan Agama Islam Di Batumarta VI Kabupaten Oku Timur" tahun 2021. Dengan hasil penelitian yaitu menunjukkan bahwa: 1) Pemahaman masyarakat tentang agama Islam Di desa Batumarta VI terbilang cukup baik. Mereka memiliki pandangan bahwasannya agama Islam tidak hanya berkaitan dengan ibadah saja melainkan juga untuk kehidupan bermasyarakat. 2) Tanggapan masyarakat desa Batumarta VI tentang pendidikan agama Islam, pendidikan agama Islam akan menghasilkan anak-anak yang berakhlak baik, berpengetahuan Islami serta pendidikan ini merupakan tanggung jawab berasama. 3) Peran dalam pelaksanaan pendidikan agama Islam baik berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari kegiatan masyarakat yang ikut dalam kegiatan keagamaan dan

anak-anak yang ikut kegiatan TPA setiap hari.[22] Pada penelitian ini penulis sama-sama membahas tentang persepsi masyarakat. Akan tetapi pada penelitian ini peneliti lebih fokus pada persepsi masyarakat terhadap perguruan tinggi.

2. Jurnal yang ditulis oleh Farah Mutia dengan judul "Persepsi Masyarakat Terhadap Lembaga Pendidikan Islam di Desa Pengkok Kedawung Sragen Jawa Tengah" tahun 2018. Dengan hasil penelitian yaitu pertama, persepsi masyarakat terhadap pendidikan Islam dan lembaga pendidikan Islam sudah cukup baik, terlihat dari banyaknya lembaga pendidikan Islam baik formal maupun informan yang memandang sangat penting pendidikan Islam dan lembaga pendidikan Islam bagi mereka. Kedua, faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat tersebut dalam memilih lembaga pendidikan Islam bagi anak-anak mereka adalah dari faktor ekonomi, pengetahuan, latar belakang pendidikan, pengalaman, kondisi lembaga, kebijakan pemerintah dan lingkungan masyarakat itu sendiri.[23] Pada jurnal diatas penulis menekankan permasalahan tentang persepsi masyarakaat terhadap lembaga pendidikan Islam di desa Pengkok Kedawung Sragen Jawa Tengah dan faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam di desa Pengkok Kedawung Sragen Jawa Tengah. Jadi, penelitian ini fokus kepada lembaga pendidikanya. Pada penelitian ini penulis menekankan

[22] Nikita Dian Paranti, "Persepsi Masyarakat Tentang Pendidikan Agama Islam Di Desa Batumarta Vi Kabupaten Oku Timur," (Tesis, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

[23] Farah Muthia, "Persepsi Masyarakat Terhadap Lembaga Pendidikan Islam Di Desa Pengkok Kedawung Sragen Jawa Tengah," *Jurnal Al-Bahtsu* Vol. 3 no. 2, (2018).

permasalahan tentang pemahaman masyarakat tentang agama Islam, tanggapan masyarakat tentang pendidikan agama Islam dan peran masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan agama Islam. Persamaan dalam penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaannya terletak pada lokasi yang dijadikan tempat penelitian.

3. Jurnal yang ditulis oleh Zainap Hartati dengan judul "Persepsi Masyarakat Pada Pendidikan Islam Di IAIN Palangka Raya (Kajian Motivasi Masyarakat untuk Masuk Ke IAIN Palangka Raya)" dengan hasil penelitian yaitu persepsi masyarakat pada pendidikan Islam di IAIN Palangka Raya sebagai salah satu perguruan tinggi Islam yang membekali ilmu-ilmu keagamaan Islam adanya motivasi masyarakat pada pendidikan di IAIN Palangka Raya, semua orang tua berkeinginan anak mereka melanjutkan kuliah di IAIN Palangka Raya, namun juga terserah pada pilihan anak, jika tersedia dana dan adanya beasiswa. Faktor yang mempengaruhi persepsi dan motivasi, dipengaruhi oleh faktor eksternal dan anak melanjutkan kuliah setelah tamat di Madrasah Aliyah akan teraktualisasikan jika adanya faktor ekstrinsik yaitu adanya dukung ketersediaan dana sehingga, anak kuliah jika ada biaya, kuliah sambil kerja atau adanya beasiswa dari IAIN Palangka Raya.[24] Pada penelitian ini penulis sama-sama membahas tentang

[24] Zainap Hartati, "Key words: implementation of the 2013 Curriculum; Islam-integrated; curriculum evaluation, CIPPO," *Canadian Center of Science and Education* Vol. 1 (2003): hal. 151-187.

persepsi Masyarakat, akan tetapi pada jurnal ini penulis fokus kepada lembaga pendidikannya.

4. Jurnal yang ditulis oleh Faridah Alawiyah dengan judul "Akses Pendidikan Tinggi dan Penyebabnya (*The Access and Distribution of Higher Education*)" dengan hasil penelitian yaitu memberikan gambaran mengenai substansi yang diatur untuk mengatasi persoalan akses pendidikan tinggi dalam undang-undang pendidikan tinggi. Langkah yang ditempuh untuk mengatasi persoalan akses dilakukan melalui jaminan pemerataan pendidikan tanpa diskriminasi, serta perluasan sebaran perguruan tinggi melalui program akademi komunitas dan program pendidikan jarak jauh. Pada penelitian ini penulis sama-sama membahas tentang akses pendidikan tinggi akan tetapi pada jurnal ini pembahasannya lebih umum mencakup seluruh wilayah Indonesia sedangakan pada penelitian ini penulis fokus pada akses pendidikan tinggi pada Kabupaten Banjar saja. Selain itu, perbedaan juga terletak pada persoalan yang diambil. Pada jurnal ini membahas persoalan akses pendidikan tinggi, yaitu mahalnya biaya pendidikan tinggi serta sebaran perguruan tinggi yang tidak merata, sedangkan pada penelitian ini penulis membahas secara keseluruhan persoalan akses pendidikan tinggi yang terjadi di Kabupaten Banjar.
5. Jurnal yang ditulis oleh Lukman Hakim dengan judul "Pemerataan Akses Pendidikan bagi Rakyat Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional" dengan hasil penelitian yaitu pembangunan pendidikan di Indonesia memiliki dua dimensi penting

yang sering menjadi permasalahan selama ini yaitu masalah perluasan akses pendidikan dan kedua pemerataan pendidikan. Kedua masalah itu hingga saat ini masih menjadi polemik di dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. Banyak faktor yang memengaruhi di dalam pelaksanaan dan pemerataan pendidikan tersebut. Perluasan ditandai dengan mudahnya masyarakat (warga negara) untuk memperoleh pendidikan, sedangkan pemerataan pendidikan adalah suatu kedaan yang sama antara pelaksanaan pendidikan yang dilaksanakan baik yang berada di kota maupun di desa. Pada penelitian ini penulis sama-sama membahas tentang akses di dalam pendidikan dan memuat undang-undang yang sama yaitu undang-undang nomor 20 tahun 2003, akan tetapi pada jurnal ini pembahasannya lebih kepada penjabaran undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang makna yang terkandung di dalamnya sedangkan pada penelitian ini penulis membahas akses pendidikan yang ada di Kabupaten Banjar beserta dengan persepsi masyarakat tentang perguruan tinggi.[25]

[25] Lukman Hakim, "Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasiona," *Dosen Universitas Al-Azhar Medan dan Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* Jurnal EduTech Vol. 2 No. 1 (Maret, 2016).

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami penelitian ini, maka peneliti membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, yang terdiri dari tinjauan umum tentang akses dan persepsi masyarakat pedesaan terhadap perguruan tinggi.

BAB III Metode penelitian yang berisikan tentang jenis penelitian, tempat dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

BAB IV Paparan data dan pembahasan yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

BAB V Penutup berisikan simpulan dan saran-saran.